

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Pemahaman Terhadap Bentuk SKMHT*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- HS., Salim, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Kasmir, 2015, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Moechthar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Prenada Media, Jakarta.

Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.

Satrio, J., 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2011, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignosoebroto, Soetandy, 2002, *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma-Elsam, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 113.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 439.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Jurnal

Cahayani, Sri Endah, “Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan”, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1, Februari, 2019.

Firmansyah, Rian dan Eni Dasuki Suhardini, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 3, 2017.

Jamillah, 2017, “Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerduta atas Jaminan Benda Milik Debitur”, *Mercatoria*, Volume 10, Nomor 2, Desember, 2017.

Juanda, H. Enju, “Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Lestari, Tri Wahyu Surya, 2017, “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab yang Halal dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 2, Desember 2017.

### Tesis

Burhan, Masykur, 2011, “Otentitas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Universitas Indonesia, Depok.

Erma Zulfa Kurniawan, 2017, “Perbandingan Otentisitas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.

Hasibuan, Goralisyahputra., 2017, “Efektivitas Dan Efisiensi Kerja PPAT Dalam Daerah Kerja Provinsi Berdasarkan PP PPAT”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara.

### Internet

Alwesius Ola, SKMHT Problem Yang Tak Boleh Dipelihara, <http://MediaNotaris.Com/Skmht Problem Yang Tak Boleh Dipelihara Berita302.Html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 20.30 WIB.

<https://inilahonline.com/kanwil-atrbpn-hubungan-kerja-dengan-ppat-bisa-horizontal-maupun-vertikal/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 12.30 WIB.